



HONESTA VOCE

Edisi 1/2024



Suara Kalangan Muda

Jejak Budaya
**Perubahan HIMA Menjadi
HMP**
Semarak Pilmapres 2024

Dikelola Oleh



Media DPM

4

Liputan Utama

Profil dan sejarah DPM Unesa
Filosofi nama dan logo parlemen

9

Berita DPM

Ketua dan wakil ketua DPM
Komisi-komisi DPM
Pelatihan Legislatif

18

Jendela Kampus

Sejarah unesa
Jurusan baru
Perubahan Hima menjadi HMP
Pilmapres
Prestasi mahasiswa

24

Parlementaria

UU Cipta Kerja
Kesetaraan gender menurut UUD
Black lives matter
Semarak menuju pilpres 2024

33

Jejak Budaya




Berbagai isu politik turut bermunculan dewasa ini, sebut saja salah satunya mengenai UU Cipta Kerja yang menuai beragam respon dari masyarakat. UU Cipta Kerja dikatakan memiliki banyak keunggulan, namun berbagai pihak menganggap ketentuannya merugikan sehingga opini publik pun terpecah. Di sisi lain, isu kesetaraan gender dan diskriminasi terhadap ras minoritas pun turut memanas.

Hiruk-pikuk mengenai Pemilihan Umum mulai diperbincangkan sejalan dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 yang telah mengamanatkan bahwa tahun 2024 akan dilaksanakan Pemilu secara serentak dalam satu tahun yaitu pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah. Sebagai mahasiswa, penting untuk terus menjaga independensi, etika, dan menghargai kebebasan berpendapat.

DPM FMIPA UNESA merupakan lembaga legislatif mahasiswa yang berada di lingkungan FMIPA UNESA, dan memiliki fungsi utama berupa fungsi pengawasan dan budgeting, fungsi legislasi, serta fungsi advokasi dan humas. Sebagai lembaga yang memegang fungsi advokasi, DPM FMIPA mempunyai tugas serta wewenang dalam menyalurkan dan menjembatani aspirasi mahasiswa FMIPA UNESA. DPM FMIPA UNESA sebagai lembaga legislatif turut ikut mengkaji setiap isu-isu politik yang ada dalam negara ini berdasarkan aspirasi-aspirasi mahasiswa FMIPA UNESA. Berbagai perubahan telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tiap periode serta meningkatkan kinerja sebagai wakil dari mahasiswa selingkup FMIPA UNESA.

Kalangan muda merupakan tonggak penerus keberlangsungan suatu Negara. Dengan tangan pemudalah perubahan-perubahan serta kemajuan suatu Negara dapat dicapai. Oleh karenanya, DPM FMIPA UNESA memilih untuk mengangkat tema **"Suara Kalangan Muda"** diangkat sebagai tajuk Majalah DPM 2023. Berbagai rubrik berkenaan dengan sejarah dan pencapaian mahasiswa UNESA, serta kebudayaan bangsa yang hampir punah pun turut dihadirkan dalam majalah ini. Dengan semangat muda yang membara, DPM FMIPA UNESA siap menjadi wadah aspirasi mahasiswa.



PROFIL DAN SEJARAH DPM FMIPA UNESA



Sebelum menyandang nama Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), sebelumnya structural kelembagaan legislatif mahasiswa di Unesa memiliki nama Dewan Lembaga Mahasiswa (DLM) yang mana dalam setiap ke dalam Dewan Lembaga Mahasiswa Fakultas (DLM F), Dewan Legislatif Mahasiswa Jurusan (DLM J), dan Dewan Legislatif Mahasiswa Program studi (DLM P). Namun, semenjak tahun 2013 kelembagaan legislatif di tingkat mahasiswa mengalami re structural sehingga dijadikan satu sebagai satuan lembaga legislatif yang menaungi selingkung fakultas masing-masing yang dikenal sebagai DPM. DPM dibentuk atas dasar pemenuhan struktur organisasi yang memerlukan sebuah badan legislatif, hal demikian terjadi karena mengingat bahwa system ormawa di Unesa hampir mengadopsi struktur pemerintahan negara.

Dengan demikian, Trias Politika diterapkan sehingga terciptanya DPM merupakan pemenuhan kelembagaan di tingkat legislatif. Sedangkan, pada eksekutif terdapat Badan Eksekutif Mahasiswa, dan Himpunan Mahasiswa Jurusan. Sebagai kelembagaan legislatif di tingkat Fakultas DPM FMIPA UNESA, telah mengalami berbagai perubahan baik secara struktural maupun keorganisasian dalam memenuhi kebutuhan masing- masingnya di setiap periode. Seperti yang terbaru dalam periode 2022 ini DPM FMIPA UNESA menambah satu struktural lagi yang bernama Media DPM, Media DPM ini berfungsi untuk membantu DPM FMIPA UNESA dalam melakukan publikasi serta pemeliharaan sosial media yang selama ini kurang diperhatikan.



DPM FMIPA atau Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNESA adalah lembaga legislatif mahasiswa yang berada di lingkungan FMIPA UNESA. DPM FMIPA UNESA sendiri memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi pengawasan dan budgeting, fungsi legislasi, fungsi advokasi dan humas, Berdasarkan fungsi advokasi DPM FMIPA UNESA mempunyai tugas serta wewenang dalam menyalurkan dan menjembatani aspirasi mahasiswa FMIPA UNESA Berdasarkan fungsi pengawasan dan budgeting DPM FMIPA UNESA mengawasi dan mengontrol aktivitas serta mengaudit dana kegiatan BEM dan HMJ diseluruh lingkup FMIPA UNESA.

Berdasarkan fungsi legislasi DPM FMIPA UNESA wewenang lain seperti merumuskan, membuat, membahas, dan mengesahkan Rancangan Peraturan Ormawa

yang telah disesuaikan dengan kebutuhan Ormawa FMIPA, serta koordinasi secara internal dengan ormawa selingkung FMIPA.

Pada struktur kepengurusan DPM terdapat Badan Pengurus Harian (BPH) yang merupakan perangkat kerja meliputi ketua, wakil ketua, sekretaris dan Bendahara. Saat ini DPM FMIPA diketuai oleh Ah. Ainur Wahid serta wakil ketuanya Shinta Irawati Sukma. Dalam kepengurusan ini surat menyurat serta pengarsipan dokumen dilakukan oleh sekretaris yang berjumlah 3 dan dalam pengelolaan keuangan dijalankan oleh Bendahara yang berjumlah 3.

Selain Badan Pengurus Harian dalam menjalankan fungsinya DPM FMIPA UNESA memiliki 4 Komisi yaitu Komisi A (Pengawasan dan Budgeting), Komisi B (Legislasi), Komisi C (Advokasi), dan Komisi D (Internal).

Dalam kerja kegiatan DPM FMIPA UNESA dibantu dengan satu structural di bawah BPH dan Komisi yaitu Media DPM dalam menjalankan tugas pemeliharaan social media, humas, dan publikasi terkait berbagai kegiatan.

Selama masa kerja DPM FMIPA UNESA juga dibantu oleh Staf ahli yang dipilih melalui open recruitment oleh anggota dewan DPM FMIPA UNESA sesuai kebutuhan. Dalam menjalankan sistem keanggotaannya DPM FMIPA UNESA menerapkan sistem

keanggotaan yang bersifat koordinatif dan instruktif secara keseluruhan dari seluruh bidang yang ada di DPM FMIPA UNESA. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (DPM FMIPA) Unesa merupakan salah satu lembaga organisasi kemahasiswaan dalam ranah legislatif dalam lingkungan FMIPA UNESA. Dalam artian ini, DPM FMIPA merupakan wakil dari mahasiswa selingkup FMIPA UNESA.



FILOSOFI NAMA & LOGO

k DPM FMIPA UNESA merupakan organisasi kelengkapan non-struktural FMIPA Unesa yang bersifat sebagai lembaga legislatif mahasiswa di lingkungan FMIPA Unesa. DPM FMIPA sebagai Lembaga legislatif berfungsi dalam pengawasan dan budgeting, fungsi legislasi, fungsi advokasi dan humas, serta fungsi internal. Setiap pergantian periode atau masa jabatan, akan dilakukan perubahan nama pada parlemen maupun logo, perubahan ini dimaksudkan untuk memberikan sinergi dan semangat baru bagi kepengurusan DPM FMIPA yang baru.

Pemilihan nama parlemen selalu menjadi angin segar dalam wajah kepengurusan yang baru. Filosofi nama parlemen ini berpengaruh terhadap bagaimana kepengurusan maupun sifat dari DPM FMIPA selama satu periode ke depan. Nama parlemen dan logo yang baru akan menjadi identitas sekaligus ciri khas dari kepengurusan DPM FMIPA pada



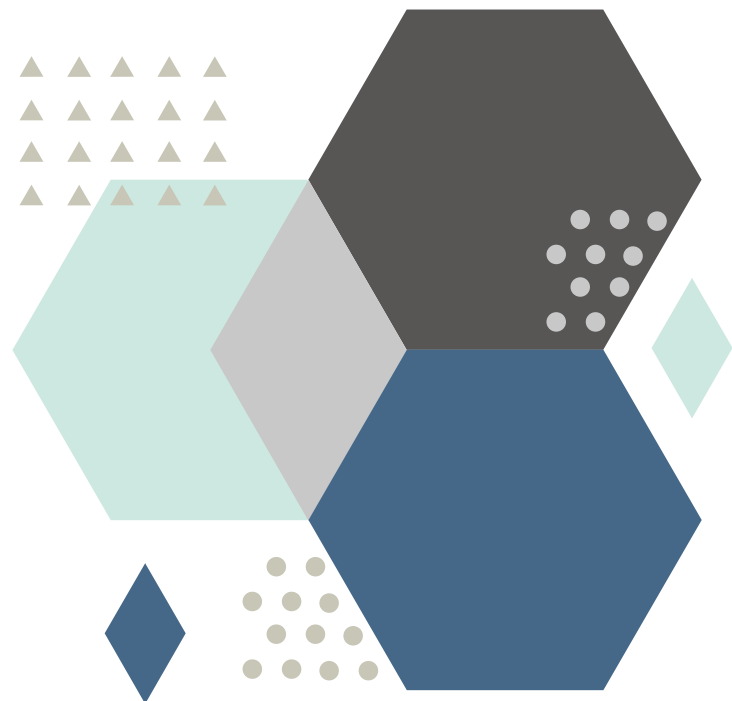
periode 2023 yang pasti akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam pembentukan nama parlemen yang akan digunakan diputuskan secara bersama-sama untuk menciptakan rasa kekeluargaan antar anggota dan fungsionaris. Pemilihan nama parlemen harus mencerminkan visi misi DPM FMIPA. Nama parlemen diusulkan dan diputuskan berdasarkan hasil keputusan Bersama dalam rapat rutin. Nama parlemen pada periode tahun 2023 ini yaitu Visus Bais.

Visus Bais berasal dari kata visus yang memiliki arti ketajaman penglihatan dan Bais yang memiliki arti tenaga pendorong dalam manusia yang diperlukan untuk mendapatkan manfaatkan dan menolak kemudaratannya sehingga harapannya dengan penglihatan yang tajam DPM FMIPA UNESA diberikan tenaga pendorong untuk mendapatkan serta memberikan manfaat dan menolak kemudaratannya. Lalu logo parlemen DPM FMIPA Periode 2023 adalah burung elang yang memiliki 5 bulu sayap.



dengan dark grayish cyan yang melambangkan stabilitas struktural serta bisa menjaga energi positif dan ketenangan dengan adanya logo ini diharapkan dengan kedepanya DPM FMIPA UNESA dapat berjalan dengan baik sesuai dengan logo yang ada. Adanya logo ini akan menjadi identitas DPM FMIPA UNESA. Dalam pemilihan logonya dipilih secara musyawarah dan diputuskan Bersama sama dalam suatu rapat rutin.

dalam menjalankan 3 fungsi legislatif. 5 helai bulu sayap melambangkan 4 komisi serta 1 media komunikasi sehingga berjumlah 5. 3 bintang melambangkan 3 fungsi legislatif yaitu pengawasan, legislasi dan advokasi. Warnanya merupakan perpaduan light grayish orange



KETUA DAN WAKIL KETUA DPM

BERIKUT POTRET PEMILIHAN TERPILIH KETUA DAN WAKIL KETUA DPM PERIODE 2023 BERSAMA DENGAN KETUA DAN WAKIL KETUA DPM FMIPA 2022.



ORGANISASI DPM FMIPA DIPIMPIN OLEH SEORANG KETUA DIBANTU OLEH WAKIL KETUA DALAM MENJALANKAN PROGRAM KERJA DAN AGENDA DALAM SATU PERIODE. DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA INI, DIAWALI DENGAN MENDAFTAR CALON ANGGOTA DPM DENGAN MENGIKUTI PEMILIHAN UMUM RAYA YANG TELAH TERLAKSANA.

Sehingga terpilih menjadi anggota DPM periode ini. Selanjutnya pemilihan ketua dan wakil ketua ini dilaksanakan dalam sidang internal anggota DPM. Pada sidang internal tersebut akan dipilih seorang ketua dan wakil ketua yang akan memimpin kepengurusan DPM periode 2023 ini.

Pada periode 2023 nama yang terpilih menjadi ketua DPM FMIPA UNESA adalah Ah. Ainur Wahid. Dalam menjalankan kepengurusannya Ainur sebagai ketua DPM FMIPA periode 2023 memiliki tugas bertanggung jawab atas keberlangsungan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPM FMIPA, berkoordinasi dengan pihak eksternal dalam menjalin kerja sama, dan lainnya. Dibantu oleh wakil ketua dengan tugas bertanggung jawab kedalam bermakna menjalin

koordinasi dalam internal ormawa yaitu antara badan eksekutif selingkung FMIPA dan membantu tugas ketua. Dalam kepengurusan inti tidak hanya ditangani oleh ketua dan wakil ketua, namun dibantu juga oleh sekretaris dan bendahara dalam mendukung keberlangsungan program kerja dan agenda selama satu periode. Pemilihan sekretaris maupun bendahara dilaksanakan dalam forum internal DPM dari anggota maupun fungsionaris yang terpilih pada periode ini.



KOMISI – KOMISI DPM

KOMISI A

Komisi A bergerak dalam bidang pengawasan, budgeting, dan audit keuangan BEM dan HIMA FMIPA. Pengawasan dilakukan pada setiap program kerja badan eksekutif selingkung FMIPA. Tujuan dilakukan pengawasan agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh badan eksekutif sesuai dengan tata tertib yang berlaku di fakultas maupun universitas sehingga tidak menyalahi aturan yang berlaku.



Pada periode kali ini, komisi A beranggotakan 7 anggota dibantu oleh 5 fungsionaris. Dimana setiap anggota dari komisi ini akan menjadi penanggung jawab setiap badan eksekutif selingkung FMIPA dan sebagai salah satu ketua pelaksana dari program kerja yang dilaksanakan oleh komisi ini. Program kerja komisi A yaitu Rapat Evaluasi. Sangat menarik bukan?. Rapat evaluasi merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh DPM FMIPA dengan membahas laporan pertanggungjawaban program kerja dan laporan pengawasan kinerja BEM FMIPA yang telah terlaksana selama setengah periode. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan akan terjalin komunikasi yang baik antara BEM FMIPA dan DPM FMIPA dalam melaksanakan tugasnya dan agar tercipta organisasi yang tertib dan transparans.

KOMISI B

Komisi B bergerak dalam bidang legislasi yaitu membuat aturan yang akan dilaksanakan DPM FMIPA maupun badan eksekutif selingkung FMIPA dalam menjalankan program kerja selama satu periode. Komisi B memiliki program kerja diantaranya: Sidang tata tertib dan kode etik DPM FMIPA, UU mekanisme pengawasan, peraturan PKKMB FMIPA, UU PEMIRA FMIPA, MMF, dan MMF-LUB. Pada periode ini, komisi B beranggotakan 6 anggota dibantu oleh 3 fungsionaris



Dalam memenuhi tanggung jawabnya, Komisi B membagi sidang menjadi beberapa pleno DIANTARANYA :

1. Sidang Tata Tertib dan Kode Etik DPM FMIPA UNESA

Sidang ini merupakan forum untuk mengatur tata tertib dan kode etik DPM FMIPA Unesa sebagai salah satu landasan hukum internal dalam menjalankan Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan FMIPA Universitas Negeri Surabaya. Sidang ini bertujuan dalam penetapan tata tertib dan kode etik DPM FMIPA Unesa.

2. Sidang Mekanisme Pengawasan DPM FMIPA UNESA

merupakan forum dalam menentukan peraturan mekanisme pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan BEM FMIPA dan HIMA selingkup FMIPA Unesa. Sidang ini bertujuan dalam penetapan peraturan mekanisme pengawasan BEM FMIPA UNESA dan HIMA selingkup FMIPA UNESA.

3. Sidang Peraturan PKKMB FMIPA UNESA

merupakan forum dalam menentukan peraturan PKKMB FMIPA Unesa sebagai salah satu landasan hukum internal demi ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan PKKMB FMIPA Unesa. Sidang ini bertujuan dalam penetapan undang-undang peraturan PKKMB FMIPA Unesa. Sidang PEMIRA FMIPA UNESA merupakan forum untuk membentuk peraturan berupa undang-undang PEMIRA FMIPA Unesa 2023 sebagai salah satu landasan hukum internal dalam menjalankan proses demokrasi di lingkungan FMIPA Unesa. Sidang ini bertujuan dalam penetapan peraturan pemilihan umum raya.

4. MMF FMIPA UNESA

MMF FMIPA merupakan forum untuk pelaporan pertanggungjawaban akhir periode lembaga keorganisasian tingkat fakultas dan pembuatan beberapa peraturan untuk periode kedepan. MMF bertujuan dalam penetapan GBHK, mekanisme organisasi, dan rekomendasi MMF XI Organisasi Kemahasiswaan FMIPA Unesa serta penetapan pelaporan pertanggungjawaban KPUR dan PANWAS PEMIRA FMIPA, BEM FMIPA dan pelaporan kinerja DPM FMIPA Unesa

5. MMF-LUB MIPA UNESA

MMF-LUB MIPA UNESA merupakan forum yang diadakan jika terjadi hal – hal mendesak dan mengancam keberlanjutan proses ORMAWA FMIPA di tengah kepengurusan. Kegiatan ini bertujuan dalam penetapan keputusan yang disepakati dalam forum tersebut.

KOMISI C

Komis C bergerak dalam bidang advokasi dengan adanya advokasi ini memudahkan penyatuan aspirasi mahasiswa FMIPA. Komisi C memiliki program kerja diantaranya, jaring aspirasi, sarasehan, rakor warga, dan dialog kebangsaan.



Komisi C pada periode ini ada 6 anggota dibantu 4 fungsionaris.

Salah satu program kerja menarik dari komisi ini yaitu dialog kebangsaan sebagai wadah aspirasi mahasiswa berpartisipasi dalam pengetahuan Pancasila dan Ideologi NKRI, meningkatkan kompetensi mahasiswa pada hal ide-ide yang kritis, kreatif dan inovatif, solutif dan aplikatif, dan sebagai wadah penumbuhan jiwa Pancasila pada mahasiswa

Tungguin saja info pelaksanaan program kerja yang akan digalakkan oleh komisi C ini. Tentu komisi C ini sangat membantu penyampaian aspirasi antara pihak mahasiswa dan birokrasi. Dari jaring aspirasi mahasiswa hingga penyampaian hasil aspirasi akan disampaikan kepada warga FMIPA.

KOMISI D

Komisi D bergerak dalam bidang internal DPM FMIPA dengan upaya-upaya meningkatkan keharmonisan organisasi secara internal dalam meningkatkan kinerja yang baik. Komisi D sangat erat dalam sebuah organisasi dalam mendorong setiap anggota dan fungsionaris untuk lebih baik dan berkarakter yang kuat serta profesional.



Komisi D pada periode ini spesial dengan 7 anggota dan 4 fungsionaris para wanita tangguh.

- Dalam Upgrading DPM FMIPA dipaparkan materi dari tiap komisi yang ada di DPM FMIPA UNESA serta dilakukan simulasi advokasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengupgrade pengetahuan anggota DPM dan fungsionaris tentang kinerja DPM FMIPA UNESA. Serta meningkatkan rasa kekeluargaan dan menjaga komitmen anggota DPM FMIPA beserta fungsionaris.
- Edukasi Parlemen bertujuan untuk Menambah wawasan terkait kelegislatifan serta mengetahui teknik persidangan yang benar. Kegiatan ini berupa kunjungan ke pihak DPRD/DPR RI guna pemberian materi terkait kelegislatifan kepada anggota DPM FMIPA UNESA.
- Kunjungan Kerja Ormawa Sebagai ajang silaturahmi antar sesama DPM dan sebagai ajang pertukaran informasi. Dalam kegiatan ini dilakukan pemaparan cara kerja, program kerja yang dilakukan dan keanggotaan dari masing-masing DPM. Pelatihan Legislatif merupakan Program pelatihan yang meliputi pemaparan materi dan pemberian tugas terkait kelegislatifan. Kegiatan pelatihan legislatif ini juga menjadi salah satu syarat pencalonan anggota DPM FMIPA UNESA.
- Rapat koordinasi ormawa FMIPA ini sebagai wadah aspirasi dan koordinasi setiap badan eksekutif dan legislatif untuk bertemu membahas suatu ide atau gagasan yang akan dibahas lebih lanjut. Kegiatan ini bertujuan mengkomunikasikan hasil rapat internal DPM FMIPA kepada lembaga eksekutif selingkung FMIPA UNESA.

MEDIA KOMUNIKASI

Media komunikasi DPM bergerak dalam bidang IT, akun social media DPM untuk menyampaikan informasi kepada warga FMIPA melalui platform digital. Media komunikasi memiliki program kerja yaitu: menerbitkan majalah DPM, Publikasi kegiatan ormawa, dan pelatihan jurnalistik yang keren



Periode ini, media komunikasi beranggotakan 2 anggota dibantu oleh 3 fungsionaris.

Majalah DPM diterbitkan sebagai media informasi, edukasi, dan demokrasi pembaca tentunya. Ada pelatihan jurnalistik yang tak kalah menarik nih akan dilaksanakan oleh media komunikasi ini dengan tujuan mampu berkompetensi dalam bidang menulis atau memproduksi karya jurnalistik baik untuk media cetak, online atau media sosial. Dengan mengikuti pelatihan jurnalistik ini diharapkan dapat mengeksplorasi sebuah informasi lebih dalam dengan tidak termakan oleh informasi hoax.

Pengenalan Legislatif Negara, Hadi Dediarysyah., S.Pd., M.Hum. Beri Motivasi Kepada Legislator Muda



Anggota DPRD Provinsi Jatim Fraksi partai Gerindra, Hadi Dediarysyah., S. Pd., M.Hum menjadi pemateri Kelegislatifan Negara dalam Acara Pelatihan Legislatif Dewan Perwakilan Mahasiswa FMIPA 2023 pada, 16 September 2023. Kegiatan ini diikuti mahasiswa Universitas Negeri Surabaya di Gedung C10 FMIPA, Universitas Negeri Surabaya. Kegiatan pelatihan legislatif bertujuan untuk menambah wawasan tentang legislatif setingkat mahasiswa untuk menciptakan jiwa-jiwa legislator muda. Selain itu menumbuhkan sikap yang optimis, bertanggung jawab dan percaya diri pada mahasiswa. Dalam kesempatannya, Hadi Dediarysyah.,S.Pd.,M.Hum yang kerap disapa cak Dedy mengatakan terkait dalam kelegislatifan negara, salah satunya untuk menumbuhkan jiwa-jiwa legislator muda pada kalangan kampus.

Legislatif merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas membuat undang-undang dan mengawasi pelaksanaan undang-undang yang telah disetujui. Salah satu lembaga legislatif pada tingkat daerah provinsi yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD terdiri atas fraksi-fraksi yang mewakili kelembagaan partai. Kelengkapan dewan yaitu komisi, setiap komisi memiliki tugasnya masing-masing. Jika ingin mengetahui mengenai legislatif harus mengerti Undang-Undang Dasar 1945 terlebih dahulu. Baginya menjadi pemimpin tidak boleh sembarangan.

“Menjadi pemimpin harus siap mengorbankan waktu, selain itu juga diukur dari kualitasnya,” ungkapnya. Lebih lanjut Cak Dedy juga menambahkan saat diwawancarai oleh salah satu mahasiswa, bagaimana kesan pesan untuk mahasiswa unesa dan cara menjadi legislator muda serta memotivasi anak muda untuk menjadi legislator muda.

“Mulai sekarang saya melihat secara nyata kampus mulai terbuka dengan arti pemikiran –pemikiran masih dibutuhkan untuk Indonesia, harapan kami dengan dibukanya kampus ini dengan menerima para politikus merupakan nuansa baru. Anak muda jaman sekarang sudah mulai nampak pola pikirnya, kajian akademisi nya sudah mulai nampak. Teruskan perjuangan ini lewat kampus karena perjuangan yang tanpa tendensi adalah perjuangan dari kalangan kampus. Perjuangan diluar kampus memiliki tendensi yang menjadi target,” jelasnya.

Cak Dedy memberikan apresiasi kepada mahasiswa Universitas Negeri Surabaya karena merupakan sejarah baru karena adanya partisipasi dari kampus agar termotivasi untuk menambah wawasan tentang legislatif setingkat mahasiswa.

“Jika menjadi legislator yang baik tentunya semua akan dimulai dari latar belakang keluarga karena hal tersebut merupakan fundamental yang sangat akurat. Untuk mahasiswa teruskan kejujuran, keberanian untuk melangkah menumbuhkan sikap hal tersebutlah cara untuk menjadi legislator yang baik. Motivasi untuk menjadi legislator muda jangan menjadi pemimpin yang majemuk, jadilah pemimpin diri sendiri, jadilah pemimpin keluarga, jadilah pemimpin rumah tangganya lalu akan meningkat menjadi pemimpin wilayahnya. Pemimpin itu harus bisa menyelesaikan diri sendiri terlebih dahulu. Pemimpin harus menyiapkan dari segala aspek dari ekonomi, SDM dan pastinya semangatnya,” tambahnya.





Sejarah Unesa

Universitas Negeri Surabaya atau yang lebih dikenal dengan sebutan UNESA merupakan salah satu kampus yang berada di Kota Surabaya. Universitas Negeri Surabaya sendiri berdiri pada tanggal 19 Desember 1964. Awalnya Universitas Negeri Surabaya bernama IKIP Surabaya atau Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Surabaya. IKIP Surabaya resmi menjadi lembaga independen pada tanggal 19 Desember 1964 berdasarkan SK Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan nomor 182/1964. Pada awalnya hanya terdapat lima fakultas di IKIP Surabaya antara lain Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Keguruan Ilmu Sosial (FKIS), Fakultas Keguruan Sastra Seni (FKSS), Fakultas Keguruan Ilmu Eksasta (FKIE), dan Fakultas Keguruan Ilmu Teknik (FKIT). Pada tanggal 1 Maret 1977, berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 042/O/1977 tertanggal 22 Februari 1977 Sekolah Tinggi Olahraga bergabung dengan IKIP dan berubah menjadi Fakultas Keguruan



sumber: edukasi.sindonews.com

Ilmu Keolahragaan (FKIK). Setelah itu IKIP memiliki enam fakultas antara lain Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS), Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA), Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS), Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK), dan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK).

Sesuai hasil rapat pada tanggal 12 Oktober 1998 disepakati nama IKIP Surabaya pasca koversi adalah Universitas Negeri Surabaya atau dapa disingkat UNESA. Berdasarkan Keppres RI No. 93 Tahun 1999, IKIP Surabaya berubah menjadi Universitas Negeri Surabaya. Saat ini Universitas Negeri Surabaya memiliki tujuh fakultas yang terletak di dua kampus yaitu kampus Ketintang dan kampus Lidah Wetan. Ketujuh fakultas tersebut antara lain Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FISH), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Teknik (FT), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Bahasa dan Seni (FBS), Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) dan Fakultas Ilmu Keolahragaan.



Kantor Pusat Pertama IKIP Surabaya di Jalan Kayoon, 1967

sumber: dispusip.surabaya.go.id



Sudah tahukah di FMIPA terdapat program studi baru ?



Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya tepatnya pada Jurusan Matematika terdapat program studi (Prodi) baru yaitu S1 Sains Data. Berdiri pada tanggal 23 Juni 2022 dan sudah terdaftar di PDDikti dengan keterangan akreditasi baik. Prodi ini memiliki beberapa keunggulan pada kurikulumnya seperti mengadopsi pokok-pokok kurikulum ACM (Association for Computing Machinery) yang disesuaikan dengan orientasi industri lebih dini dan juga kurikulumnya dirancang dengan melibatkan dunia industri, pemerintah serta asosiasi sains data dalam dan luar negeri. Prodi Sains Data berfokus untuk mempelajari tentang perpaduan informatika, statistika, matematika terapan, ilmu komputasi, dan kecerdasan artificial. Tidak hanya itu, mata kuliah dalam Prodi S1 Sains Data terdapat artificial intelligent, neuro cognitive science, machinelearning, software engineering, bioinformatics, data mining, basis data, robotics, python programming basis data, dan big data.

Prospek karir kedepannya bagi lulusan Prodi S1 Sains Data dapat menjadi data scientist, data analyst, digital entrepreneur, asisten peneliti, data engineer, dan pengembang teknologi sains data. Harapan lulusan Prodi S1 Sains Data mampu menguasai teori dan konsep sains data, menguasai teori matematika dan statistika berkaitan dengan sains data, menerapkan prinsip-prinsip sains data untuk menyelesaikan masalah, menggunakan teknologi dalam bidang sains data, membuat program komputer berdasarkan algoritma yang telah dirancang, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, memiliki sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang sains data secara mandiri, memiliki semangat kemandirian serta daya juang, dan mampu membawa perubahan terhadap lingkungan.





Kira-kira Kenapa

HIMA berubah menjadi HMP?



Universitas Negeri Surabaya (Unesa) mengubah statusnya menjadi PTN-BH berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.37 Tahun 2022 tentang PTN-BH Unesa yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober 2022. Perubahan status PTN-BLU menjadi PTN-BH tidaklah mudah karena harus memenuhi berbagai syarat yang telah ditentukan. Berikut mengenai persyaratan dasar PTN-BH yaitu menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang bermutu, mengelola lembaga berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, memenuhi standar minimal kelayakan finansial, menjalankan tanggung jawab sosial, dan berperan dalam perekonomian daerah hingga nasional.

Dari segi otonomi kampus, PTN-BH dapat secara mandiri dalam membuka maupun menutup Program Studi yang ada, berbeda dengan PTN-BLU yang tidak dapat melakukan hal tersebut. Sehingga perubahan status tersebut mampu menjadikan Program Studi menjadi pusat

jurusan dan akademik. Dampak lainnya adalah perubahan nama HIMA yang menjadi HMP karena berkaitan dengan perubahan status Unesa dan juga pusat akademik. Perubahan nama tersebut adalah yang kedua kalinya. Sebelum nya juga terjadi perubahan dari HMJ menjadi HIMA. Hal tersebut berpengaruh pada struktur organisasi yang mengharuskan berdirinya himpunan di setiap prodi. Ketua Himpunan juga seharusnya berbeda disesuaikan dengan prodi yang ada. Karena sudah tidak lagi berpusat pada jurusan yang menjadi dampak perubahan program kerja nantinya.





Apa yang kalian tahu tentang Pemilihan mahasiswa Berprestasi?



Pemilihan Mahasiswa Berprestasi atau dikenal dengan sebutan PILMAPRES merupakan kegiatan yang dibentuk sebagai wadah untuk mengapresiasi mahasiswa yang berprestasi secara akademik maupun non-akademik. Ajang PILMAPRES diadakan oleh Kementerian Riset dan Teknologi Dikti. PILMAPRES di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) tahun 2023 diadakan seleksi pada tingkat Jurusan maupun Program Studi terlebih dahulu. Setelah lolos pada tahap pertama, perwakilan tadi melakukan seleksi di tingkat Fakultas untuk penilaian portofolio. Setelah lolos pada tahap seleksi Fakultas diadakan pendampingan TWK, kemampuan Bahasa Inggris, karya ilmiah, poster, dan finalisasi portofolio. Lalu Mahasiswa berprestasi (Mawapres) diseleksi kembali untuk menjadi Mawapres Unesa.

Hasil seleksi tahap Fakultas terbagi menjadi 2 kategori, yaitu Mawapres Utama dan Mawapres Muda dengan masing-masing kategori terdapat 3 juara. Perwakilan dari

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) adalah juara 1 Mawapres Utama yaitu Afaurina Indriana dari Prodi S1 Pendidikan Fisika. Namun amat disayangkan perwakilan dari FMIPA gagal pada seleksi tingkat Universitas dan yang menjadi Mawapres Unesa adalah mahasiswa dari Prodi S1 Bahasa Inggris.





Prestasi Mahasiswa UNESA



Universitas Negeri Surabaya merupakan universitas yang selalu mencetak mahasiswa - mahasiswa berprestasi. Prestasi yang diraih tidak hanya secara individu, bahkan juga secara berkelompok dan organisasi. Prestasi tersebut tidak hanya datang baik dari segi akademik, tetapi juga non akademik. Hal ini membuat Universitas Negeri Surabaya menjadi tidak kalah unggul dengan universitas-universitas lain di Indonesia dan mampu menjadi universitas yang memiliki segudang prestasi.

Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Mahasiswa atau yang biasa disebut dengan PPK Ormawa merupakan suatu program tahunan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelayanan Perguruan Tinggi (L2Dikti). Program ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas organisasi mahasiswa melalui program yang dibuat oleh organisasi mahasiswa itu sendiri. Selain itu juga tujuan dari diselenggarakannya PPK Ormawa untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi dalam memperkuat kapasitas Ormawa agar mampu menjadi Organisasi Kemahasiswaan yang kompeten, modern, berkarakter dan cinta tanah air. PPK Ormawa diselenggarakan setiap tahun dan terdiri dari beberapa tahapan antara lain sosialisasi, pengumpulan sub proposal dan proposal, seleksi administrasi sub proposal dan proposal, dan pengumuman hasil seleksi. PPK Ormawa ini dapat diikuti oleh semua organisasi mahasiswa yang ada di seluruh institut maupun universitas yang ada di Indonesia. Pada tahun ini, Universitas Negeri Surabaya berhasil meloloskan 8 tim dari berbagai organisasi mahasiswa. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam sendiri berhasil mengirimkan empat tim PPK Ormawa yaitu BEM FMIPA, HIMA Fisika, HIMA Biologi dan DPM FMIPA. Tidak dapat dipungkiri PPK Ormawa ini menjadi salah satu prestasi yang membanggakan karena program ini berada di tingkat nasional.

UU CIPTA KERJA



sumber: tribunnews.com

Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja atau juga dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020, untuk meningkatkan lingkungan bisnis di sana dan memacu ekspansi ekonomi. Undang-undang ini menimbulkan kontroversi karena sejumlah ketentuannya dianggap merugikan hak-hak pekerja. UU Cipta Kerja memiliki ketentuan utama sebagai berikut:

1. Relaksasi perizinan investasi

Dengan mengurangi persyaratan perizinan investasi, UU Cipta Kerja berupaya mendorong investasi internasional di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mendorong perluasan ekonomi dan pengembangan lapangan kerja.

2. Perizinan bisnis itu sederhana.

UU Cipta Kerja menawarkan kemudahan bagi pelaku usaha dalam perizinan perusahaan selain investasi. Kesederhanaan perizinan diperkirakan akan mendorong ekspansi korporasi di Indonesia.

3. Penyederhanaan Ketenagakerjaan

UU Cipta Kerja juga mengatur penyederhanaan UU Ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Undang-undang ini memuat sejumlah ketentuan yang dinilai merugikan hak pekerja, antara lain ketentuan kontrak kerja yang lebih fleksibel, pengurangan cuti tahunan, dan penghapusan upah minimum.

4.. Pendirian BPJS dan BPJAMSOSTEK

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSAMSOSTEK) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) yang akan menggantikan posisi Jamsostek dan BPJS Kesehatan juga dibentuk berdasarkan UU Cipta Kerja. Organisasi baru ini dibuat dengan tujuan memberikan perlindungan sosial yang lebih kepada pekerja Indonesia.

5. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

UU Cipta Kerja juga meningkatkan kemampuan Indonesia untuk mempertahankan hak kekayaan intelektual warganya. Hal ini dilakukan untuk mendukung inovasi dan penciptaan karya baru Indonesia.



sumber: solopos.com

Pendapat publik dan serikat pekerja terpecah atas Undang-Undang Cipta Kerja, juga dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang disetujui oleh pemerintah Indonesia. Aspek utama dari Undang-Undang ini, meliputi pelonggaran persyaratan perizinan investasi, penyederhanaan prosedur perizinan perusahaan, pelonggaran undang-undang ketenagakerjaan, pembentukan BPJS dan BPJAMSOSTEK, dan perlindungan hak kekayaan intelektual.

Pemerintah Indonesia mengadopsi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memicu perdebatan di kalangan masyarakat. Meskipun tujuan utama UU Cipta Kerja adalah meningkatkan iklim usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi, beberapa ketentuannya seperti persyaratan kontrak kerja yang lebih fleksibel, pengurangan cuti tahunan, dan penghapusan upah minimum dianggap merugikan terhadap hak pekerja. Hal tersebut merugikan pekerja dikarenakan Fleksibilitas kontrak kerja yang lebih besar dapat mengurangi kepastian kerja dan perlindungan hukum pekerja, Pengurangan cuti tahunan dapat mempengaruhi keseimbangan kerja-pribadi dan kesejahteraan pekerja serta Penghapusan upah minimum berpotensi mengurangi pendapatan pekerja dan mengarah pada eksploitasi upah. Akibatnya, banyak serikat pekerja dan pekerja telah mengorganisir aksi unjuk rasa besar-besaran dan demonstrasi menentang undang-undang ini di seluruh Indonesia.

UU Cipta Kerja memang memiliki beberapa keunggulan, seperti kemudahan perizinan usaha dan penanaman modal, yang dapat mendorong pertumbuhan korporasi di Indonesia. Selain itu, pengembangan BPJS dan BPJAMSOSTEK dapat menawarkan perlindungan sosial yang lebih baik bagi pekerja di Indonesia. Namun, penting untuk diingat bahwa persepsi terhadap UU Cipta Kerja bervariasi antara pemerintah dan publik. Meskipun pemerintah melihat undang-undang ini sebagai langkah positif untuk memperbaiki iklim bisnis dan mendorong pertumbuhan ekonomi, publik memiliki berbagai pandangan yang lebih kompleks. Sejumlah kelompok dan serikat pekerja menganggap UU Cipta Kerja merugikan hak-hak pekerja dan mengurangi perlindungan mereka. Kontroversi ini menunjukkan perbedaan pendapat dan persepsi yang ada terhadap undang-undang ini di masyarakat. Pemerintah dan organisasi terkait harus menjamin terpeliharanya hak-hak pekerja untuk mengurangi dampak buruk UU Cipta Kerja terhadap hak-hak mereka. Untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah mencerminkan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Untuk mengurangi dampak buruk UU Cipta Kerja terhadap hak-hak pekerja, masyarakat dapat mengimplementasikan langkah-langkah berikut. Pertama, meningkatkan kesadaran dan edukasi pekerja tentang hak-hak mereka yang dijamin oleh undang-undang. Kedua, mendorong pembentukan serikat pekerja atau bergabung dengan serikat yang sudah ada untuk memperjuangkan kepentingan kolektif. Ketiga, memperkuat dialog sosial antara pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Keempat, memastikan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran hak-hak pekerja. Terakhir, aktif berpartisipasi dalam proses politik, seperti pemilihan umum, untuk memilih pemimpin yang memperjuangkan hak-hak pekerja. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan hak-hak pekerja tetap terjaga.

KESETARAAN GENDER ?

Konstitusi Indonesia mengakui dan menjunjung kesetaraan gender secara legal melalui sejumlah pasal yang menegaskan laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Namun, terlepas dari perlindungan hukum ini, diskriminasi gender masih terjadi di masyarakat dengan berbagai cara. Akibatnya, pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai instrumen internasional yang menekankan pentingnya kesetaraan gender dan telah mengeluarkan kebijakan dan program untuk mempromosikan kesetaraan gender, seperti Program Pembangunan Berbasis Gender (PPBG). Semua aspek masyarakat, termasuk pemerintah, dunia usaha, LSM, dan masyarakat sipil, harus bekerja sama dan bersama-sama untuk memajukan kesetaraan gender. Ide kesetaraan gender mengacu pada pemberian hak dan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan tanpa berbasis jenis kelamin. diskriminasi. Konstitusi Indonesia (UUD) telah mengakui dan menjaga gagasan kesetaraan gender.

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri sendiri, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak asasi manusia yang tidak dapat dihilangkan atau dikurangi dengan alasan apapun," bunyi Pasal 28G ayat (2) UUD 1945. Setiap orang memiliki hak yang sama, termasuk perempuan, menurut pasal ini, dan hak tersebut tidak dapat dicabut atau dikurangi.

Selain itu, Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa "setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum". Artikel ini berfokus pada gagasan bahwa setiap orang, termasuk perempuan, memiliki hak yang sama atas perlindungan hukum yang bebas dari diskriminasi berbasis jenis kelamin.

Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan bernegara sekaligus dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, menurut Pasal 28A ayat (2) UUD 1945. Setiap orang, tanpa kecuali, mempunyai hak yang sama di depan hukum dan dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana ditunjukkan dalam pasal ini.

Selain itu, menurut Pasal 28J ayat (2), "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang diakui oleh undang-undang". Pentingnya menjaga hak-hak individu, khususnya perempuan dalam keluarga, tempat kerja, dan kehidupan sosial ditekankan dalam pasal ini.

Setiap orang juga berhak memperoleh pendidikan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan". Menurut pasal ini, setiap orang, termasuk laki-laki dan perempuan, harus memiliki akses pendidikan.



Pernyataan Pasal 27 ayat (1) bahwa “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” berlaku bagi ketenagakerjaan. Esai ini memberikan penekanan yang kuat pada kebutuhan untuk membuat pekerjaan dapat diakses oleh laki-laki dan perempuan. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang cukup untuk menegakkan martabat dan kemajuannya dalam masyarakat, menurut Pasal 27 ayat (2).

Diskriminasi gender masih ada di masyarakat dalam berbagai bentuk, meskipun konstitusi Indonesia menjaminkannya. Salah satu ilustrasinya adalah adanya kesenjangan gender dalam akses kesempatan kerja, pendidikan, dan partisipasi politik.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai undang-undang dan program yang ditujukan untuk mempromosikan kesetaraan gender guna memerangi berbagai bentuk diskriminasi gender yang terjadi. Program Pembangunan Berbasis Gender (PPBG), misalnya, berupaya meningkatkan kesetaraan gender di beberapa bidang terkait pembangunan.

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) merupakan salah satu dokumen internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia yang menekankan nilai kesetaraan gender. Konvensi Hak Anak, Konvensi Pekerjaan Layak untuk Perempuan dan Laki-Laki, dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial hanyalah sebagian kecil dari dokumen internasional tentang hak-hak perempuan yang telah diratifikasi oleh Indonesia.



sumber: aisyiahstudies.org

Pemerintah, sektor komersial, LSM, dan masyarakat sipil semuanya memiliki dampak yang signifikan terhadap prakarsa untuk memajukan kesetaraan gender. Untuk mencapai kesetaraan gender yang sebenarnya di Indonesia, semua pihak harus bekerja sama.

Konstitusi Indonesia mengakui dan menjunjung kesetaraan gender secara legal melalui sejumlah pasal yang menegaskan laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Namun, terlepas dari perlindungan hukum ini, diskriminasi gender masih terjadi di masyarakat dengan berbagai cara. Akibatnya, pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai instrumen internasional yang menekankan pentingnya kesetaraan gender dan telah mengeluarkan kebijakan dan program untuk mempromosikan kesetaraan gender, seperti Program Pembangunan Berbasis Gender (PPBG). Semua lapisan masyarakat, termasuk pemerintah, dunia usaha, LSM, dan masyarakat sipil, harus bekerja sama dan bersinergi untuk memajukan kesetaraan gender.

BLACK LIVES MATTER

Bukankah semua orang sama dimata hukum ?

Gerakan sosial yang dikenal sebagai Black Lives Matter (BLM) dimulai di Amerika Serikat sebagai respons terhadap diskriminasi rasial dan kekerasan polisi terhadap orang kulit hitam. Gerakan ini telah berkembang secara global dan memunculkan diskusi tentang keadilan sosial dan isu-isu rasial. Di Indonesia, banyak orang yang prihatin terhadap rasisme dan prasangka telah mengikuti dan mendukung gerakan ini.

Keberadaan orang-orang keturunan Afrika masih belum banyak diketahui atau diperhatikan di Indonesia. Mayoritas orang Indonesia masih menggunakan istilah "negro" atau "hitam dan manis" untuk menggambarkan orang-orang keturunan Afrika, meskipun ungkapan ini dapat menyinggung orang lain.

Pasca insiden yang melibatkan George Floyd, seorang pria kulit hitam yang tewas akibat ulah oknum polisi di Amerika Serikat, Black Lives Matter (BLM) menjadi topik hangat di Indonesia pada tahun 2020. Protes dan demonstrasi dipicu oleh tragedi ini dan menyebar ke sejumlah negara di dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, masyarakat turut berpartisipasi dalam aksi protes untuk menyuarakan keadilan sosial, menentang rasisme, dan mendukung gerakan Black Lives Matter.



sumber: detik.com

Banyak protes yang mendukung gerakan BLM telah terjadi di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir, sejak awal tahun 2021 hingga saat ini. Melalui aksi tersebut, pengunjung rasa mengecam kekerasan dan prasangka rasial terhadap orang kulit hitam di Indonesia dan Amerika Serikat.

Memang, rasisme dan diskriminasi rasial adalah isu utama di Indonesia, khususnya bagi etnis minoritas seperti Papua, Timur Tengah, dan Afrika-Amerika. Mereka sering menghadapi prasangka dan perlakuan tidak adil di tempat kerja, lingkungan sosial, hingga di mata publik.

Pemerintah Indonesia perlu mengambil tindakan segera dan tegas untuk memerangi rasisme dan prasangka rasial. Pendidikan toleransi dan penjangkauan keadilan sosial harus ditekankan di semua tingkatan, mulai dari ruang kelas hingga tempat kerja. Dalam situasi ini, media memiliki peranan yang penting dalam menyebarkan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran semua orang tentang isu-isu yang berkaitan dengan rasisme dan prasangka juga sangat penting.



sumber: slate.com

Di Indonesia, sejumlah NGO (Non-Governmental Organization/Organisasi Non-Pemerintah) dan aktivis sosial saat ini sedang mengambil aksi untuk menunjukkan dukungannya terhadap gerakan BLM. NGO merupakan organisasi yang bergerak di luar lingkup pemerintahan dan bertujuan untuk memperjuangkan isu-isu sosial, hak asasi manusia, dan keadilan. Mereka berperan penting dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya memperjuangkan keadilan sosial dan menegakkan hak asasi manusia bagi semua orang tanpa diskriminasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka mengadakan berbagai kegiatan solidaritas seperti forum terbuka, kampanye internet, dan upaya kolaboratif dengan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.

Kesimpulannya, gerakan Black Lives Matter telah mempengaruhi budaya Indonesia secara signifikan dengan mengangkat topik rasisme dan diskriminasi rasial serta memicu perbincangan tentangnya. Tindakan dan koordinasi yang konkrit diperlukan untuk mengatasi kegiatan ini, mulai dari pemerintah, media, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya.

PILMAPRES

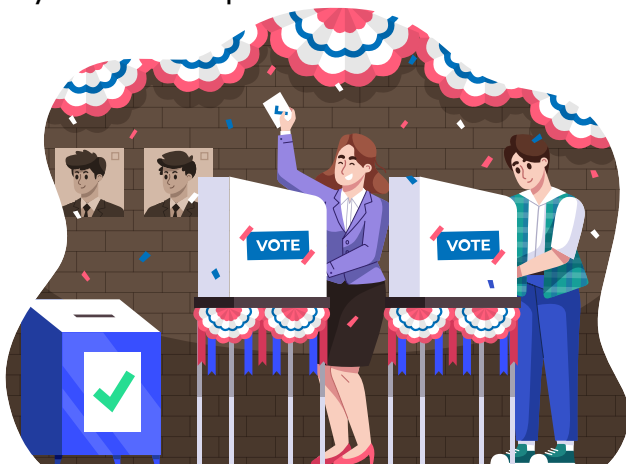
2024



2024

sumber: sukoharjo,kpu.go.id

ILPRES atau Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2024 adalah sebuah proses demokrasi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masa bakti 2024–2029. Pemilihan presiden yang ke 5 ini akan terselenggara pada Rabu, 14 Februari 2024. Pemilihan umum ini akan dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD seluruh Indonesia sementara Pemilihan Umum Kepala Daerah baru akan dilaksanakan pada bulan November. Dalam hal ini mahasiswa dapat berperan menyemarakkan pemilihan ini.



Sebagai mahasiswa yang dapat kita lakukan adalah Mahasiswa dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran politik di kalangan rekan mahasiswa dan masyarakat umum. Mereka dapat mengadakan diskusi, seminar, dan lokakarya untuk membahas isu-isu politik yang relevan, mempromosikan pemahaman tentang pemilihan presiden, dan mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi. mendiskusikan program-program calon presiden, dan memberikan informasi objektif kepada publik. Mahasiswa dapat terlibat dalam kampanye politik untuk calon presiden yang mereka dukung. Mereka dapat membantu dalam penyebaran materi kampanye, penyelenggaraan acara kampanye, dan sosialisasi program calon presiden kepada mahasiswa dan masyarakat umum. Selain itu, mereka dapat mendorong partisipasi pemilih dengan melakukan mobilisasi pemilih, terutama di kalangan mahasiswa dan generasi muda.

Mahasiswa dapat berperan sebagai pengamat pemilu untuk memastikan transparansi, integritas, dan keadilan dalam pemilihan presiden. Dengan memantau proses pemilihan, mereka dapat membantu meminimalisir kecurangan dan pelanggaran yang mungkin terjadi. Mahasiswa dapat memimpin atau terlibat dalam kampanye sosial dan gerakan advokasi yang berhubungan dengan pemilihan presiden. Mereka dapat menggunakan media sosial, aksi langsung, kampanye offline, atau proyek-proyek kreatif lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu penting, seperti partisipasi pemilih, transparansi pemilihan, atau perlindungan demokrasi. Peran mahasiswa dalam pemilihan presiden dapat beragam dan bergantung pada kepentingan, pandangan politik, dan inisiatif individu. Penting bagi mahasiswa untuk menjaga independensi, objektivitas, dan etika dalam menjalankan peran mereka.



sumber: detik.com

Penting juga bagi mahasiswa untuk selalu menghormati kebebasan berpendapat dan perbedaan pendapat. "Yang menjadi titik penting sekarang adalah siapapun bakal calon presiden, harapannya bisa patuh pada prinsip-prinsip pemilu yang tercantum pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Sehingga diharapkan siapapun yang masih memiliki tanggung jawab atas sesuatu dapat dituntaskan dengan baik terlebih dahulu dan tidak ada yang istilahnya adalah mencuri start kampanye karena masa kampanye pemilu sudah ditetapkan pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Toh belum tentu juga siapapun yang diusung oleh partai politik akan lolos dari tahap seleksi administrasi dll.

Saya juga berharap masyarakat Indonesia dapat memilih calon presiden yang dapat membuat perubahan pada kondisi ekonomi, pembangunan dll di Indonesia. Dan masyarakat jangan pernah termakan oleh uang politik atau biasa yang disebut serangan fajar, karena satu suara itu adalah yang akan menentukan arah nasib Bangsa Indonesia kita tercinta" menurut Ainur ketua DPM FMIPA UNESA. Harapannya pada pemilihan presiden ini masyarakat dapat memilih sesuai dengan hati nuraninya dan dilakukan secara LUBERJURDIL atau langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sehingga tidak terjadi kecurangan dalam pemilihan ini.

Jejak Budaya

Budaya merupakan tradisi yang diwariskan bersifat turun temurun. Secara etimologis, budaya berasal dari bahasa sansekerta dan memiliki bentuk jamak budi dan daya. Budi artinya akal dan pikiran, sedangkan daya artinya usaha dan ikhtiar. Jadi, kebudayaan dapat diartikan sebagai segala akal dan pikiran dalam berupaya atau berusaha untuk memenuhi hidup sehari-hari. Indonesia termasuk negara yang kaya akan keanekaragaman, baik itu sumber daya alam maupun kebudayaannya. Setiap wilayah memiliki kebudayaan yang unik dan berbeda satu sama lain. Tak sedikit warisan budaya dapat dijadikan sebagai ciri khas dan cerminan dari suatu daerah di Indonesia. Namun, saat ini banyak warisan budaya Indonesia yang terancam punah. Sebab, warisan budaya tersebut luntur tergerus oleh perkembangan zaman yang semakin canggih dan maju.

Dari berbagai keanekaragaman bangsa Indonesia, ada beberapa yang sudah hampir punah baik itu budaya, bahasa, adat istiadat. Faktor utama yang dapat mempengaruhi kepunahan dan kehilangan kebudayaan adalah perkembangan zaman. Para penerus bangsa secara tidak sadar kurang memperhatikan, bahkan melupakan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Banyak dari mereka yang tidak tahu tentang kebudayaan yang ada di daerahnya sendiri, bahkan tidak sedikit dari mereka yang lebih memedulikan .



Foto : kemdikbud.go.id

atau mengetahui kebudayaan negara lain dibandingkan dengan kebudayaan yang dimiliki oleh negaranya sendiri. Generasi muda sekarang yang mulai tidak terlalu mementingkan kebudayaan menjadi salah satu faktor penyebab kepunahan kebudayaan di Indonesia

Seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi secara pesat, kita sebagai para penerus bangsa harus terus menyadari pentingnya melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Melestarikan kebudayaan merupakan tanggung jawab kita semua sebagai warga Indonesia. Kita dapat memulai melestarikannya dari budaya yang ada di daerah kita masing-masing yaitu dengan melindungi kearifan lokal dari kepunahan. Selain melestarikan, tentunya kita juga perlu merawat alam, sejarah, dan segala yang sudah diberikan oleh nenek moyang karena semua itu merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita rawat, jaga, serta lestarikan agar tidak punah dan termakan oleh perkembangan zaman.



Foto : wikimedia.org

Salah satu kebudayaan yang hampir punah adalah tari merawai dari Kepulauan Riau. Tari ini biasanya dipertunjukkan sebagai hiburan untuk mengisi waktu senggang. Namun, tarian ini hampir punah karena masyarakat jarang menampilkannya karena tergeser oleh teknologi modern. Tari merawai dimainkan anak-anak dengan jumlah penari sebanyak tujuh orang. Pola gerakan tari ini seperti orang yang sedang mengayuh sampan. Alat musik pengiringnya berupa gendang panjang, gendang pengiring joget, gong dan biola.



Foto : Surakarta.go.id

Ada pula kesenian dari Jawa Timur yaitu Ludruk yang hampir punah karena kurangnya antusias penonton akibat masyarakat lebih memilih menonton film atau sinetron. Dan sekarang orang-orang lebih menyukai pertunjukkan konser daripada Ludruk. Kebudayaan lain yang hampir punah adalah Sisingaan. Sisingaan adalah seni pertunjukan rakyat Subang yang menggunakan dua sampai empat boneka singa, kepala boneka singa tersebut terbuat dari kayu dan bambu yang dibungkus kain dan digunakan sebagai properti ketika menari. Namun, pada zaman sekarang, seni ini terancam punah. Oleh karena itu, kita harus mulai melestarikannya. Salah satunya adalah dengan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam seni Sisingaan, seperti ketertiban, gotong royong, dan kerjasama. Mari kita sebagai para penerus bangsa terus melestarikan kebudayaan dan kearifan lokal di Indonesia agar warisan budaya kita masih tetap ada sampai di generasi-generasi berikutnya.



**MEDIA KOMUNIKASI
DPM FMIPA UNESA**



<https://dpm.fmipa.unesa.ac.id/>



dpmfmipa@unesa.ac.id